

## BAB IV KESIMPULAN

Sanksi ekonomi dan blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar antara tahun 2017-2021 tidak efektif, sebab hingga sanksi berakhir, Qatar tidak memenuhi tuntutan sanksi maupun mengubah arah kebijakannya sesuai dengan preferensi negara-negara pemblokade. Berdasarkan indikator internasional, Qatar akan mengalami *political cost* yang lebih tinggi jika memenuhi tuntutan sanksi. Seluruh tuntutan yang diberikan oleh negara-negara pemblokade bersifat mutlak, mengancam kedaulatan, mengancam reputasi Qatar di tingkat internasional, serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasan tersebut mendorong Qatar untuk tidak memenuhi tuntutan yang diberikan.

Seluruh komponen *stateness* yaitu otonomi, kapasitas ekonomi, kapasitas koersif, dan legitimasi memengaruhi satu sama lain. Sistem pemerintahan dan prosedur pembuatan kebijakan Qatar yang terpusat dipengaruhi oleh sejarah dan demografi rakyat Qatar yang terdiri dari kelompok-kelompok tertentu dan dikuasai oleh keluarga Al-Thani. Otonomi yang dimiliki oleh emir dan lingkup terdekatnya memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan dengan cepat di tengah sanksi. Kemampuan otonomi pemerintah ditambah pula oleh kapasitas ekonomi yang tinggi berdasarkan pendapatan dan kekayaan negara yang mumpuni sehingga dampak negatif sanksi terhadap perekonomian dapat ditanggulangi dengan mudah melalui kebijakan ekonomi, diversifikasi komoditas produksi, dan pembukaan jalur perdagangan alternatif. Namun, dipengaruhi oleh statusnya sebagai *small state*, Qatar memiliki kapasitas koersif yang rendah. Di sisi lain, kemampuan Qatar untuk menyelesaikan konflik dan masalah tanpa penggunaan langkah koersif turut memengaruhi tingkat legitimasi masyarakat. Sebagai negara yang kaya, Qatar mendapatkan legitimasi dengan praktik *rentier effect*, sehingga rakyat cenderung puas dan tunduk kepada rezim. Legitimasi semakin diperkuat dengan minimnya pihak oposisi yang mengancam rezim serta pembuatan kebijakan yang mendukung narasi nasionalisme di tengah masyarakat.

Dengan tingkat *TSI-Non Compliance* dan *stateness* yang tinggi, kekuasaan Qatar cukup stabil hingga dapat menghadapi dampak sanksi menggunakan sumber daya yang dimiliki negara tanpa adanya perlawanan atau tekanan dari kelompok domestik. Akibatnya, Qatar mampu beradaptasi dengan dampak sanksi dan menghadapi sanksi dengan tingkat kerugian yang rendah.